



**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190, TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAKSIMILE (021) 7398323
SITUS <http://www.menpan.go.id>

PENGUMUMAN

NOMOR : B/ **177** /S.KP.01.00/2019

TENTANG

**PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2019**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 368 Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2019, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) Republik Indonesia membuka kesempatan kepada Warga Negara Indonesia, pria dan wanita untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang akan ditugaskan di lingkungan Kementerian PANRB dan Komisi Aparatur Sipil Negara dengan ketentuan pada pengumuman ini.

I. UNIT KERJA YANG MENDAPATKAN ALOKASI FORMASI (ALOKASI PENEMPATAN)

Pelamar dapat memilih unit penempatan **Kementerian PANRB** (56 formasi) atau **Komisi Aparatur Sipil Negara** (84 formasi).

Kementerian PANRB meliputi:

1. Sekretariat Kementerian PANRB (**SETMEN**);
2. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan (**RBKUNWAS**);
3. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana (**BALAK**);
4. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur (**SDMA**);
5. Deputi Bidang Pelayanan Publik (**YANLIK**); dan
6. Inspektorat Kementerian PANRB (**INSP**).

Komisi Aparatur Sipil Negara meliputi:

1. Sekretariat Komisi Aparatur Sipil Negara (**SETKASN**);
2. Kelompok Kerja Bidang Promosi dan Advokasi (**PA**);
3. Kelompok Kerja Bidang Pengawasan dan Monitoring Evaluasi (**MONEV**);
4. Kelompok Kerja Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem (**PPS**);
5. Kelompok Kerja Bidang Pengaduan dan Penyelidikan (**DUDIK**); dan
6. Kelompok Kerja Bidang Mediasi dan Perlindungan Sistem Merit (**MP**).

II. JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN JUMLAH ALOKASI FORMASI

A. PENEMPATAN KEMENTERIAN PANRB

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI			JUMLAH FORMASI 56	UNIT KERJA		
			UMUM	KHUSUS					
				C	D	P			
1	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU HUKUM / S-1 HUKUM	1				1	SETMEN	
		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S- 1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S- 1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU EKONOMI	1				1	SETMEN	
		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S- 1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S- 1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM	1	1				2	RBKUNWAS
		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S- 1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S- 1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK / S-1 HUKUM TATA NEGARA / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S- 1 SISTEM INFORMASI	5	1				6	BALAK
		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S- 1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S- 1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU EKONOMI / S- 1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S- 1 ILMU HUKUM / S-1 PSIKOLOGI / S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI	3	1				4	SDMA

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI			JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA
			UMUM	KHUSUS			
				C	D	P	
		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBUJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM / S-1 KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMUNIKASI	4	1		5	YANLIK
2	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA*	S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM	1			1	SETMEN
3	ARSIPARIS AHLI PERTAMA	D-IV KEARSIPAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	2			2	SDMA, YANLIK
4	PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA AHLI PERTAMA*	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI	1			1	SETMEN
5	PERENCANA AHLI PERTAMA*	S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN	2	1		3	SETMEN
		S-1 MANAJEMEN	1			1	BALAK
		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBUJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU HUKUM / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 MANAJEMEN	2			2	SDMA
		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBUJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMUNIKASI	2			2	YANLIK
6	PRANATA KOMPUTER PELAKSANA/TERAMPIL	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	3			3	SETMEN
7	ARSIPARIS PELAKSANA/TERAMPIL	D-III KEARSIPAN / D-III INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III ILMU	1			1	SETMEN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI			JUMLAH FORMASI	UNIT KERJA	
			UMUM	KHUSUS				
				C	D	P		56
		PERPUSTAKAAN / D-III PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI						
8	ANALIS ADVOKASI HUKUM*	S-1 ILMU HUKUM / S-1 HUKUM	2		1		3	SETMEN
9	ANALIS HUKUM*	S-1 ILMU HUKUM / S-1 HUKUM	2				2	SETMEN
10	ANALIS LAPORAN KEUANGAN	S-1 ILMU EKONOMI / S-1 AKUNTANSI	1				1	SETMEN
11	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN	S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1				1	BALAK
12	ANALIS TATA USAHA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU EKONOMI	1				1	INSP
13	PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER	1				1	SETMEN
14	ASSESSOR SDM APARATUR AHLI PERTAMA	S-2 PSIKOLOGI / S-2 PSIKOLOGI TERAPAN	1				1	SETMEN
15	ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM	9			1	10	RBKUNWAS
16	PRANATA KEARSIPAN	D-III KEARSIPAN / D-III INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III SEKRETARI / D-III KESEKRETARIATAN	1				1	INSP
TOTAL			49	5	1	1	56	

Keterangan:

Jenis Formasi Khusus:

C = *Cumlaude*

D = Disabilitas

P = Putra/Putri Papua dan Papua Barat

Nama jabatan dengan tanda (*) dapat dilamar oleh pelamar disabilitas pada Formasi Umum dan Formasi Khusus selain Formasi Khusus Disabilitas.

B. PENEMPATAN KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI			ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA	
			UMUM	KHUSUS				
				C	D	P		84
1.	ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK	8	1			9	MONEV, MP
		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU SEJARAH	3	1			4	PA
2	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / S-1 PSIKOLOGI	1				1	PA
		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA	3	1			4	MONEV
3	AUDITOR AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 PSIKOLOGI	7	1			8	DUDIK
4	AUDITOR KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1	5			1	6	PPS, MONEV

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI			ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA
			UMUM	KHUSUS			
				C	D	P	
		ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK					
5	PERANCANG PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN AHLI PERTAMA*	S-1 ILMU HUKUM / S-1 HUKUM	1			1	SETKASN
6	PERENCANA AHLI PERTAMA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU HUKUM / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 STATISTIKA	2			2	SETKASN
7	ARSIPARIS PELAKSANA/TERAMPIL	D-III KEARSIPAN / D-III INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III ILMU PERPUSTAKAAN / D-III PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI	4			4	MONEV, DUDIK, SETKASN
8	ANALIS ADVOKASI HUKUM	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU HUKUM / S-1 HUKUM	2			2	PA
9	ANALIS BERITA	S-1 KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 JURNALISTIK / S-1 ILMU SEJARAH / S-1 SOSIOLOGI	1			1	SETKASN
10	ANALIS DATA DAN INFORMASI*	S-1 STATISTIKA / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU EKONOMI	1			1	SETKASN
11	ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM / S-1 HUKUM	4	1		5	MP, SETKASN
12	ANALIS KELEMBAGAAN *	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK	1			1	SETKASN
13	ANALIS KERJASAMA LINTAS SEKTOR	S-1 ILMU HUKUM / S-1 HUKUM / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL	1			1	SETKASN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI			ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA
			UMUM	KHUSUS			
				C	D	P	
14	ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI	1			1	DUDIK
15	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU EKONOMI	1		1	2	SETKASN
16	ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK	1	1		2	MONEV
17	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	S-1 STATISTIKA / D-IV STATISTIKA	1			1	SETKASN
18	ANALIS PUBLIKASI	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 KOMUNIKASI	2	1		3	PA
19	ANALIS SISTEM INFORMASI	S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	3		1	4	PPS, MONEV, SETKASN
20	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR*	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK	1			1	SETKASN
21	PENATA KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI	1	1		2	SETKASN
22	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	1			1	PPS
23	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III AKUNTANSI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER	1			1	SETKASN
24	PENGELOLA DATA LAYANAN INFORMASI	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNIK INFORMATIKA	1			1	SETKASN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JENIS FORMASI			ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA
			UMUM	KHUSUS			
				C	D	P	
	DAN EDUKASI PUBLIK						
25	PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER	2			2	SETKASN
26	PENGOLAH DATA ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN*	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNIK INFORMATIKA	1			1	SETKASN
27	PENYUSUN BAHAN BANTUAN HUKUM	S-1 ILMU HUKUM / S-1 HUKUM	2			2	MP
28	PENYUSUN BAHAN BANTUAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 DESAIN GRAFIS / D-IV DESAIN GRAFIS	1			1	SETKASN
29	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU EKONOMI	1			1	SETKASN
30	SEKRETARIS	D-III SEKRETARI / D-III KESEKRETARIATAN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	5			5	MONEV, PA, PPS, DUDIK, MP
31	TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	D-III TEKNIK ELEKTRO / D-III TEKNIK SIPIL / D-III TEKNIK MESIN / D-III TEKNIK LISTRIK	1			1	SETKASN
32	TEKNISI PERALATAN KANTOR	D-III TEKNIK ELEKTRO / D-III TEKNIK MESIN / D-III TEKNIK LISTRIK	2			2	SETKASN
TOTAL			73	8	2	1	84

Keterangan:

Jenis Formasi Khusus:

C = *Cumlaude*

D = Disabilitas

P = Putra/Putri Papua dan Papua Barat

Nama jabatan dengan tanda (*) dapat dilamar oleh pelamar disabilitas pada Formasi Umum dan Formasi Khusus selain Formasi Khusus Disabilitas.

III. JENIS FORMASI

Dalam pengadaan CPNS 2019 terdapat 2 (dua) jenis formasi, yaitu formasi umum dan formasi khusus. Formasi Khusus terdiri dari *Cumlaude*, Disabilitas dan Putra/Putri Papua dan Papua Barat dengan penjelasan sebagai berikut:

1. *Cumlaude* adalah pelamar formasi lulusan terbaik berpredikat dengan pujian (*Cumlaude*) dikhususkan bagi putra/putri lulusan minimal jenjang pendidikan Strata 1 dari Perguruan Tinggi terakreditasi A / Unggul dan Program Studi terakreditasi A / Unggul pada saat kelulusan.
2. Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas fisik yaitu: Amputasi kaki, Lumpuh layuh atau kaku pada kaki, dan *Paraplegia* (anggota tubuh bagian bawah yang meliputi kedua tungkai dan organ panggul). Pelamar disabilitas diharapkan mampu melakukan tugas seperti menganalisis, mengetik, menyampaikan buah pikiran dan berdiskusi.
3. Putra/Putri Papua dan Papua Barat adalah pelamar yang merupakan keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu) asli Papua dan Papua Barat, dibuktikan dengan akte kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari kepala desa/kepala suku.

IV. PERSYARATAN UMUM PELAMAR

1. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia, dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih.
3. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Badan Usaha Mlik Negara / Badan Usaha Milik Daerah atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta.
4. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
6. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan.
7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan jabatan yang dilamar.
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Tidak terlibat dalam organisasi kemasyarakatan yang dinyatakan terlarang oleh pemerintah.
10. Tidak memiliki ketergantungan terhadap narkoba dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya.
11. Tidak bertato atau bekas tato dan tindik atau bekas tindik anggota badan lainnya selain di telinga kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama atau adat.
12. Bersedia mengabdikan pada Kementerian PANRB dan tidak mengajukan pindah dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak Terhitung Mulai Tanggal PNS.

13. Untuk pelamar formasi Umum merupakan lulusan Magister (S-2), Sarjana (S-1), Diploma IV (D-IV) atau Diploma III (D-III) sesuai dengan syarat jabatan pada formasi jabatan yang dilamar, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol) dari skala 4,00 (empat koma nol) yang berasal dari Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi Terakreditasi dalam BAN-PT.
14. Untuk pelamar formasi khusus
- a. Pelamar **Cumlaude** dengan persyaratan:
 - 1) Pelamar merupakan lulusan Sarjana (S-1) sesuai dengan syarat jabatan pada formasi jabatan yang dilamar; dan
 - 2) Pelamar merupakan lulusan terbaik berpredikat dengan pujian (Cumlaude) dari:
 - a) Perguruan Tinggi Dalam Negeri terakreditasi A / Unggul dan Program Studi terakreditasi A / Unggul pada saat kelulusan dan dibuktikan dengan surat keterangan lulus dengan pujian (Cumlaude), atau
 - b) Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan melampirkan bukti penyeteraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusannya setara *Cumlaude* Perguruan Tinggi Dalam Negeri dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - b. Untuk pelamar formasi khusus **Disabilitas** merupakan lulusan Sarjana (S-1) sesuai dengan syarat jabatan pada formasi jabatan yang dilamar, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 (tiga koma nol) dari skala 4,00 (empat koma nol) yang berasal dari Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi Terakreditasi dalam BAN-PT; dan
 - c. Untuk pelamar formasi khusus **Putra/Putri Papua dan Papua Barat** dengan persyaratan:
 - 1) Memiliki garis keturunan orang tua (bapak dan/atau ibu) asli Papua dan Papua Barat, dibuktikan dengan akte kelahiran dan/atau surat keterangan lahir yang bersangkutan dan diperkuat dengan surat keterangan dari kepala desa/kepala suku; dan
 - 2) Pelamar merupakan lulusan Sarjana (S-1) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dari skala 4,00 (empat koma nol) yang berasal dari Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi Terakreditasi dalam BAN-PT.
15. Pelamar disabilitas dapat pula mendaftar pada formasi Umum atau formasi Khusus selain formasi khusus **Disabilitas**, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Melamar jabatan dengan tanda (*) pada tabel di atas;
 - b. Menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas dan dibuktikan dengan dokumen/surat keterangan resmi yang berlaku dari Rumah Sakit Pemerintah / Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya (format terlampir);
 - c. Tata cara dan waktu pelaksanaan SKD dan SKB bagi penyandang disabilitas yang melamar pada formasi Umum atau formasi Khusus selain formasi Disabilitas, sama dengan formasi Umum yaitu 90 (sembilan puluh) menit; dan
 - d. Nilai ambang batas/*passing grade* mengikuti nilai ambang batas/*passing grade* formasi Umum atau formasi Khusus sesuai yang dilamar.

16. Usia pada saat melamar adalah:
 - a. Minimal 18 tahun dan maksimal usia 35 tahun 0 bulan 0 hari untuk Magister (S-2), Sarjana (S-1), dan Diploma IV (D-IV); dan
 - b. Minimal 18 tahun dan maksimal usia 30 tahun 0 bulan 0 hari untuk Diploma III (D-III).
17. Pelamar yang memiliki ijazah pendidikan dari Universitas Luar Negeri (LN), wajib memiliki Surat Penyetaraan Ijazah yang dilegalisir yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

V. PERSYARATAN KHUSUS PELAMAR

1. Jabatan Pranata Komputer Pelaksana/Terampil pada formasi Kementerian PANRB no 8 dan Jabatan Analis Sistem Informasi pada formasi KASN nomor 19 wajib:
 - a. Menguasai bahasa pemrograman (PHP / Java Android, MySQL);
 - b. Menguasai *database engineer* (Web Server Administrator, Cloud Computing Administrator); dan
 - c. Melampirkan hasil pembuatan sendiri aplikasi *web apps* dalam bentuk *screenshot* atau link aplikasi.
2. Jabatan Pengelola Sistem dan Jaringan pada formasi Kementerian PANRB nomor 13 dan formasi KASN nomor 25 wajib:
 - a. Menguasai *network engineer* (bandwidth management, routing, switching, IP management);
 - b. Menguasai *system engineer* (Linux administrator, DNS administrator); dan
 - c. Menguasai instalasi dan mengelola *server mail* (email administrator).
3. Jabatan Assessor SDM Aparatur Ahli Pertama pada formasi Kementerian PANRB nomor 14, dengan kualifikasi pendidikan S2, maka pendidikan S2-nya harus linear dengan pendidikan S1 dan pelamar wajib melampirkan ijazah S1.
4. Jabatan Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi pada formasi KASN nomor 28 wajib:
 - a. Menguasai *layout* desain dan aplikasi desain grafis (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw);
 - b. Diutamakan menguasai aplikasi desain animasi (Adobe After Effect, Adobe Premiere); dan
 - c. Melampirkan hasil pembuatan sendiri desain grafis yang pernah dibuat dalam bentuk *soft copy* atau link pemuatan hasil karya.

VI. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> terdiri dari:
 - a. *Scan* Surat lamaran yang diketik menggunakan komputer dan ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, bermaterai Rp6.000,- dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam (format surat lamaran terlampir);
 - b. *Scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik asli atau Surat Keterangan Kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).
 - c. *Scan* Ijazah Asli dan Sertifikat Akreditasi Program Studi dari BAN-PT;
 - d. *Scan* Transkrip Nilai Ijazah Asli;
 - e. *Soft copy* pas foto terbaru berlatar belakang warna merah berukuran 3x4 (foto maksimal ukuran 200 KB); dan
 - f. *Scan* Surat Pernyataan Data Diri Pelamar yang diketik menggunakan komputer, bermaterai Rp6.000,- dan ditandatangani oleh pelamar dengan pena bertinta hitam (format surat pernyataan terlampir);
 - g. Dokumen lainnya sesuai yang dipersyaratkan:
 - 1) bagi formasi khusus Cumlaude, Disabilitas, maupun Putra/Putri Papua dan Papua Barat pada bagian IV. PERSYARATAN UMUM PELAMAR Nomor 14; dan/atau
 - 2) persyaratan khusus pada bagian V. PERSYARATAN KHUSUS PELAMAR.Dokumen pada huruf f dan g digabung menjadi 1 (satu) file pdf lalu diunggah pada "Dokumen Pendukung Lainnya".
2. Pendaftaran dan unggah dokumen persyaratan pendukung lainnya dilakukan secara *online* melalui laman: <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Kartu Keluarga (KK).

VII.TAHAPAN SELEKSI

Tahapan Seleksi meliputi:

1. Seleksi Administrasi;
2. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) yang meliputi ujian:
 - a. Tes Karakter Pribadi (TKP);
 - b. Tes Wawasan Kebangsaan (TWK);
 - c. Tes Intelegensi Umum (TIU);

3. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dan nilai ambang batasnya terdiri dari:

No	Tes	Bobot	Nilai Ambang Batas
1	Substansi Jabatan dengan menggunakan <i>Computer Assisted Test</i> (CAT)	50%	Tidak ada
2	ITP TOEFL Paper-based	10%	a. Skor 450 formasi Umum dan formasi khusus <i>Cum laude</i> ; dan b. Skor 400 formasi khusus Disabilitas dan formasi khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat
3	Psikotes	15%	Minimal hasil rekomendasi adalah "Dipertimbangkan", dimana kriteria rekomendasi sebagai berikut: a. Disarankan; b. Masih Dapat Disarankan; c. Dipertimbangkan; d. Tidak Disarankan.
4	Wawancara <i>user</i>	25%	60
	Total	100%	

4. Khusus pelamar jabatan sebagaimana disebut pada bagian V. PERSYARATAN KHUSUS PELAMAR, Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dan nilai ambang batasnya terdiri dari:

No	Tes	Bobot	Nilai Ambang Batas
1	Substansi Jabatan dengan menggunakan <i>Computer Assisted Test</i> (CAT)	50%	Tidak ada
2	ITP TOEFL Paper-based	10%	a. Skor 450 formasi Umum dan formasi khusus <i>Cum laude</i> ; dan b. Skor 400 formasi khusus Disabilitas dan formasi khusus Putra/Putri Papua dan Papua Barat
3	Psikotes	15%	Minimal hasil rekomendasi adalah "Dipertimbangkan", dimana kriteria rekomendasi sebagai berikut: a. Disarankan; b. Masih Dapat Disarankan; c. Dipertimbangkan; d. Tidak Disarankan.
4	Wawancara <i>user</i>	25 %	60
	Praktik kerja komputer		
	Total	100%	

VIII. SISTEM KELULUSAN

1. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi melalui laman <https://sscASN.bkn.go.id>. Adapun kelulusan seleksi administrasi akan diumumkan oleh Tim Pengadaan pada laman <https://www.menpan.go.id>. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscASN.bkn.go.id>.
2. Peserta SKB adalah peserta yang lulus SKD dan memiliki peringkat 3 (tiga) teratas dari skor SKD pada tiap formasi jabatan yang dilamar sesuai dengan kualifikasi pendidikan.
3. Nilai SKB dibawah nilai ambang batas akan menggugurkan peserta pada tes ITP TOEFL Paper-based, psikotes, dan wawancara user, serta praktik kerja komputer (bagi jabatan tertentu).
4. Kelulusan Akhir ditentukan berdasarkan hasil integrasi dari nilai SKD dan nilai SKB oleh Panitia Seleksi CPNS Nasional dengan bobot untuk SKD 40% dan untuk SKB 60% yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahun 2019 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.

IX. LAIN-LAIN

1. Peserta P1/TL dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS tahun 2019 dengan menggunakan kualifikasi pendidikan yang sama saat melamar sebagai CPNS tahun 2018. Peserta P1/TL tersebut diberikan peluang menggunakan nilai terbaik antara nilai SKD tahun 2018 dengan nilai SKD tahun 2019 sebagai dasar untuk dapat mengikuti tahap SKB selanjutnya.
2. Bagi pelamar yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi diberikan kesempatan untuk menyanggah pada masa sanggah maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman hasil seleksi administrasi. Panitia Seleksi CPNS akan memverifikasi kembali kesesuaian persyaratan dengan dokumen yang diunggah pelamar sampai dengan penetapan keputusan sanggah.
3. Tempat Pelaksanaan tahapan seleksi:
 - a. Tempat pelaksanaan SKD dapat dipilih oleh peserta sesuai dengan lokasi yang telah ditentukan; dan
 - b. Tempat pelaksanaan SKB dilakukan di Jakarta.
4. Terhadap peserta yang tidak hadir dan/atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.

5. Setiap informasi/perubahan informasi yang terkait dengan penerimaan CPNS Kementerian PANRB Tahun 2019 akan diumumkan secara resmi melalui laman Kementerian PANRB <https://www.menpan.go.id>. Harap para pelamar untuk dapat selalu mengakses laman di atas secara rutin/periodik untuk mendapatkan informasi terbaru tentang informasi CPNS Kementerian PANRB Tahun 2019. Tim Pengadaan tidak bertanggung jawab terhadap informasi yang tidak tersampaikan atau tidak terinformasikan kepada pelamar yang dikarenakan pelamar lalai dalam mengakses informasi yang terdapat pada laman di atas.
6. Untuk formasi khusus Disabilitas, panitia seleksi akan melakukan verifikasi persyaratan pendaftaran untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis dan derajat kedisabilitasinya.
7. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus/diterima kemudian mengundurkan diri atau digugurkan dikarenakan oleh sebab atau alasan tertentu, maka Tim Pengadaan dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat. Peserta tersebut akan mendapatkan sanksi tidak boleh mendaftar seleksi CPNS di periode berikutnya.
8. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain.
9. Kelulusan peserta adalah prestasi peserta sendiri. Jika ada pihak-pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apapun, maka hal tersebut merupakan tindakan penipuan. Kepada para peserta, keluarga, dan pihak lain dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang dilarang dalam Peraturan Perundang-undangan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian PANRB. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
10. Apabila dalam pelaksanaan tahapan seleksi atau dikemudian hari setelah adanya pengumuman kelulusan akhir, diketahui terdapat keterangan pelamar yang tidak sesuai /tidak benar/menyalahi ketentuan, Tim Pengadaan dapat menggugurkan kelulusan yang bersangkutan.
11. Pendaftaran dan seluruh proses seleksi tidak dipungut biaya.
12. Keputusan Tim Pengadaan CPNS Kementerian PANRB bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
13. Pengaduan, pelayanan, dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Kementerian PANRB Tahun Anggaran 2019 dapat menghubungi **WhatsApp: 0896-7735-7088** (tidak menerima SMS dan telepon, hanya aktif melayani pada hari kerja Senin-Jumat, pukul 08.00-16.00 WIB).

Jakarta, // November 2019
Ketua Tim Pengadaan CPNS
Kementerian PANRB Tahun 2019,



LAMPIRAN
PENGUMUMAN

NOMOR: B/177/S.KP.01.00/2019
TANGGAL : 11 November 2019

JADWAL SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS)
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
TAHUN ANGGARAN 2019

NO.	KEGIATAN	TANGGAL*
1.	Pengumuman (https://www.menpan.go.id/)	11 – 25 November 2019
2.	Pendaftaran Online (https://sscASN.bkn.go.id/)	11 – 25 November 2019
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	3 Desember 2019
4.	Masa Sanggah	4 – 6 Desember 2019
5.	Pengumuman Hasil Sanggah	13 Desember 2019
6.	Seleksi Kompetensi Dasar (SKD)	Februari 2020
7.	Pengumuman Peserta Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)	Maret 2020
8.	Seleksi Kompetensi Bidang	Maret 2020
9.	Pengumuman Akhir Seleksi CPNS	April 2020

*) Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian melalui laman <https://www.menpan.go.id>.

Jakarta, 11 November 2019
Ketua Tim Pengadaan CPNS
Kementerian PANRB Tahun 2019,



Dwi Wahyu Atmaji

**RINCIAN PENETAPAN KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2		4		5
JUMLAH SELURUHNYA			140		
1	AHLI PERTAMA - ANALIS KEBIJAKAN	S-1 ILMU HUKUM / S-1 HUKUM	32	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN , BIRO MANAJEMEN KINERJA, ORGANISASI, DAN KERJA SAMA , BAGIAN KERJA SAMA , SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN KOORDINASI KERJA SAMA , ANALIS KEBIJAKAN
		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU EKONOMI		1	SEKRETARIS KEMENTERIAN , BIRO MANAJEMEN KINERJA, ORGANISASI, DAN KERJA SAMA , BAGIAN KERJA SAMA , SUBBAGIAN ADMINISTRASI KERJA SAMA , ANALIS KEBIJAKAN
		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM		1	DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN , ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN III , BIDANG KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN III-1 , ANALIS KEBIJAKAN
				1	DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN , ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN III , BIDANG KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN III-2 , ANALIS KEBIJAKAN
		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK / S-1 HUKUM TATA NEGARA / S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 SISTEM INFORMASI		2	DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA , ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK , BIDANG PENYIAPAN PERUMUSAN KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK , SUBBIDANG ANALISIS KEBIJAKAN PENERAPAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK , ANALIS KEBIJAKAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2		4		5
				1	DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA , ASISTEN DEPUTI ASESMEN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN DAN PEMERINTAH DAERAH , BIDANG ASESMEN DAN PENYIAPAN KOORDINASI KELEMBAGAAN POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN DAN PEMERINTAH DAERAH , SUBBIDANG ASESMEN DAN PENYIAPAN KOORDINASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH , ANALIS KEBIJAKAN
				1	DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA , ASISTEN DEPUTI ASESMEN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN , BIDANG ASESMEN DAN PENYIAPAN KOORDINASI KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA PEREKONOMIAN , SUBBIDANG PENYIAPAN KOORDINASI KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA PEREKONOMIAN , ANALIS KEBIJAKAN
				1	DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA , ASISTEN DEPUTI ASESMEN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN , BIDANG ASESMEN DAN PENYIAPAN KOORDINASI KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA KEMARITIMAN , SUBBIDANG PENYIAPAN KOORDINASI KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA KEMARITIMAN , ANALIS KEBIJAKAN
				1	DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA , ASISTEN DEPUTI ASESMEN DAN KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN , BIDANG ASESMEN DAN PENYIAPAN KOORDINASI KELEMBAGAAN PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN , ANALIS KEBIJAKAN
		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM / S-1 PSIKOLOGI / S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI		1	DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR , ASISTEN DEPUTI PERENCANAAN DAN PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR , BIDANG PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR , SUBBIDANG PERENCANAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL , ANALIS KEBIJAKAN
				1	DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR , ASISTEN DEPUTI PERENCANAAN DAN PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR , BIDANG SISTEM INFORMASI DAN EVALUASI PERENCANAAN DAN PENGADAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR , SUBBIDANG SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR , ANALIS KEBIJAKAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2		4		5
				1	DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR , ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI JABATAN DAN PENGEMBANGAN KARIER SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR , BIDANG JABATAN PELAKSANA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR , SUBBIDANG JABATAN PELAKSANA PEMERINTAH PUSAT , ANALIS KEBIJAKAN
				1	DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR , ASISTEN DEPUTI STANDARDISASI JABATAN DAN PENGEMBANGAN KARIER SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR , BIDANG JABATAN PELAKSANA SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR , SUBBIDANG JABATAN PELAKSANA PEMERINTAH DAERAH , ANALIS KEBIJAKAN
		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM / S-1 KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMUNIKASI		1	DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK , ASISTEN DEPUTI PERUMUSAN KEBIJAKAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK , BIDANG PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK , SUBBIDANG PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK , ANALIS KEBIJAKAN
				1	DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK , ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK WILAYAH I , BIDANG KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK WILAYAH I-1 , ANALIS KEBIJAKAN
				1	DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK , ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK WILAYAH II , BIDANG KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK WILAYAH II-1 , ANALIS KEBIJAKAN
				1	DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK , ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK WILAYAH II , BIDANG KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK WILAYAH II-2 , SUBBIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK WILAYAH II-2 , ANALIS KEBIJAKAN
				1	DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK , ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK WILAYAH III , BIDANG KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI PELAYANAN PUBLIK WILAYAH III-2 , SUBBIDANG PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK WILAYAH III-2 , ANALIS KEBIJAKAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2		4		5
		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK		8	KOMISI ASN , ASISTEN KASN BIDANG PENGAWASAN DAN MONITORING EVALUASI , ANALIS KEBIJAKAN
		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK		1	KOMISI ASN , ASISTEN KASN BIDANG MEDIASI DAN PERLINDUNGAN SISTEM MERIT , ANALIS KEBIJAKAN
		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU SEJARAH		4	KOMISI ASN , ASISTEN KASN BIDANG PROMOSI DAN ADVOKASI , ANALIS KEBIJAKAN
2	AHLI PERTAMA - ANALIS KEPEGAWAIAN	S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM	6	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN , BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM , BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA , SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR , ANALIS KEPEGAWAIAN
		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA / S-1 PSIKOLOGI		1	KOMISI ASN , ASISTEN KASN BIDANG PROMOSI DAN ADVOKASI , ANALIS KEPEGAWAIAN
		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA		4	KOMISI ASN , ASISTEN KASN BIDANG PENGAWASAN DAN MONITORING EVALUASI , ANALIS KEPEGAWAIAN
3	AHLI PERTAMA - ARSIPARIS	D-IV KEARSIPAN / S-1 ILMU PERPUSTAKAAN	2	1	DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR , SEKRETARIS DEPUTI , BAGIAN ADMINISTRASI DAN PELAPORAN , SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM , ARSIPARIS
				1	DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK , SEKRETARIS DEPUTI , BAGIAN ADMINISTRASI DAN PELAPORAN , SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM , ARSIPARIS

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2		4		5
4	AHLI PERTAMA - AUDITOR	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 PSIKOLOGI	8	8	KOMISI ASN , ASISTEN KASN BIDANG PENGADUAN DAN PENYELIDIKAN , AUDITOR
5	AHLI PERTAMA - AUDITOR KEPEGAWAIAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK	6	2	KOMISI ASN , ASISTEN KASN BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM , AUDITOR KEPEGAWAIAN
				4	KOMISI ASN , ASISTEN KASN BIDANG PENGAWASAN DAN MONITORING EVALUASI , AUDITOR KEPEGAWAIAN
6	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI	1	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN , BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM , BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN , SUBBAGIAN PERLENGKAPAN , PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA
7	AHLI PERTAMA - PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN	S-1 ILMU HUKUM / S-1 HUKUM	1	1	KOMISI ASN , KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT , KEPALA SUBBAGIAN HUKUM , PERANCANG PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN
8	AHLI PERTAMA - PERENCANA	S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN	10	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN , BIRO MANAJEMEN KINERJA, ORGANISASI, DAN KERJA SAMA , BAGIAN PERENCANAAN KINERJA DAN PENGANGGARAN , SUBBAGIAN PERENCANAAN KINERJA , PERENCANA
				2	SEKRETARIS KEMENTERIAN , BIRO MANAJEMEN KINERJA, ORGANISASI, DAN KERJA SAMA , BAGIAN PERENCANAAN KINERJA DAN PENGANGGARAN , SUBBAGIAN PENGANGGARAN
		S-1 MANAJEMEN		1	DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA , SEKRETARIS DEPUTI , BAGIAN PERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN , SUBBAGIAN PENYUSUNAN ANGGARAN , PERENCANA
		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 ILMU HUKUM / S-1 HUKUM / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 MANAJEMEN		1	DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR , SEKRETARIS DEPUTI , BAGIAN PERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN , SUBBAGIAN PERENCANAAN KINERJA , PERENCANA

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2		4		5
				1	DEPUTI BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR , SEKRETARIS DEPUTI , BAGIAN ADMINISTRASI DAN PELAPORAN , SUBBAGIAN ADMINISTRASI UMUM , PERENCANA
		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 ILMU POLITIK / S-1 KOMUNIKASI / S-1 ILMU KOMUNIKASI		1	DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK , SEKRETARIS DEPUTI , BAGIAN PERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN , SUBBAGIAN PENYUSUNAN ANGGARAN , PERENCANA
				1	DEPUTI BIDANG PELAYANAN PUBLIK , SEKRETARIS DEPUTI , BAGIAN ADMINISTRASI DAN PELAPORAN , SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN , PERENCANA
		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU HUKUM / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 STATISTIKA		2	KOMISI ASN , KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KERJASAMA , KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM , PERENCANA
9	PELAKSANA/TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA	3	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN , BIRO HUKUM, KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK , BAGIAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI , SUBBAGIAN PENGOLAHAN DATA DAN DUKUNGAN TEKNOLOGI INFORMASI , PRANATA KOMPUTER
				1	SEKRETARIS KEMENTERIAN , BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM , BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA , SUBBAGIAN MUTASI SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR , PRANATA KOMPUTER
				1	SEKRETARIS KEMENTERIAN , BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM , BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA , SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR , PRANATA KOMPUTER
10	PELAKSANA/TERAMPIL - ARSIPARIS	D-III KEARSIPAN / D-III INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III PERPUSTAKAAN / D-III ILMU PERPUSTAKAAN / D-III PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI	5	1	KOMISI ASN , ASISTEN KASN BIDANG PENGAWASAN DAN MONITORING EVALUASI , ARSIPARIS
				1	KOMISI ASN , ASISTEN KASN BIDANG PENGADUAN DAN PENYELIDIKAN , ARSIPARIS
				2	KOMISI ASN , KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM , KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA , ARSIPARIS

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2		4		5
				1	SEKRETARIS KEMENTERIAN , BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM , BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA , SUBBAGIAN KESEJAHTERAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR , ARSIPARIS
11	ANALIS ADVOKASI HUKUM	S-1 ILMU HUKUM / S-1 HUKUM	5	3	SEKRETARIS KEMENTERIAN , BIRO HUKUM, KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK , BAGIAN HUKUM , SUBBAGIAN ADVOKASI HUKUM
		S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK / S-1 ILMU HUKUM / S-1 HUKUM		2	KOMISI ASN , ASISTEN KASN BIDANG PROMOSI DAN ADVOKASI
12	ANALIS BERITA	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 JURNALISTIK / S-1 KOMUNIKASI JURNALISTIK / S-1 ILMU SEJARAH / S-1 SOSIOLOGI	1	1	KOMISI ASN , KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT , KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
13	ANALIS DATA DAN INFORMASI	S-1 STATISTIKA / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU EKONOMI	1	1	KOMISI ASN , KEPALA BAGIAN DATA DAN INFORMASI , KEPALA SUBBAGIAN PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI
14	ANALIS HUKUM	S-1 ILMU HUKUM / S-1 HUKUM	7	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN , BIRO HUKUM, KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK , BAGIAN HUKUM , SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN JARINGAN DOKUMENTASI HUKUM
				1	SEKRETARIS KEMENTERIAN , BIRO HUKUM, KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK , BAGIAN HUKUM , SUBBAGIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
		S-1 ILMU HUKUM / S-1 HUKUM		3	KOMISI ASN , ASISTEN KASN BIDANG MEDIASI DAN PERLINDUNGAN SISTEM MERIT
				2	KOMISI ASN , KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT , KEPALA SUBBAGIAN HUKUM
15	ANALIS KELEMBAGAAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK	1	1	KOMISI ASN , KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM , KEPALA SUBBAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI
16	ANALIS KERJASAMA LINTAS SEKTOR	S-1 ILMU HUKUM / S-1 HUKUM / S-1 HUBUNGAN INTERNASIONAL / S-1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL	1	1	KOMISI ASN , KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KERJASAMA , KEPALA SUBBAGIAN KERJASAMA

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2		4		5
17	ANALIS LAPORAN KEUANGAN	S-1 ILMU EKONOMI / S-1 AKUNTANSI	1	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN , BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM , BAGIAN KEUANGAN , SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
18	ANALIS PENGADUAN MASYARAKAT	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 SISTEM INFORMASI	1	1	KOMISI ASN , ASISTEN KASN BIDANG PENGADUAN DAN PENYELIDIKAN
19	ANALIS PENGELOLAAN KEUANGAN	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN	3	1	DEPUTI BIDANG KELEMBAGAAN DAN TATA LAKSANA , SEKRETARIS DEPUTI , BAGIAN PERENCANAAN KINERJA DAN ANGGARAN , SUBBAGIAN PENYUSUNAN ANGGARAN
		S-1 AKUNTANSI / S-1 ILMU EKONOMI		2	KOMISI ASN , KEPALA BAGIAN KEUANGAN , KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN
20	ANALIS PENGEMBANGAN SDM APARATUR	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK	2	2	KOMISI ASN , ASISTEN KASN BIDANG PENGAWASAN DAN MONITORING EVALUASI
21	ANALIS PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN	S-1 STATISTIKA / D-IV STATISTIKA	1	1	KOMISI ASN , KEPALA BAGIAN PERENCANAAN DAN KERJASAMA , KEPALA SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN
22	ANALIS PUBLIKASI	S-1 ILMU KOMUNIKASI / S-1 KOMUNIKASI	3	3	KOMISI ASN , ASISTEN KASN BIDANG PROMOSI DAN ADVOKASI
23	ANALIS SISTEM INFORMASI	S-1 SISTEM KOMPUTER / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK / S-1 TEKNOLOGI INFORMASI	4	1	KOMISI ASN , ASISTEN KASN BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
				1	KOMISI ASN , KEPALA BAGIAN DATA DAN INFORMASI , KEPALA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN JARINGAN
				1	KOMISI ASN , KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM , KEPALA SUBBAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2		4		5
				1	KOMISI ASN , ASISTEN KASN BIDANG PENGAWASAN DAN MONITORING EVALUASI
24	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK	1	1	KOMISI ASN , KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM , KEPALA SUBBAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI
25	ANALIS TATA USAHA	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 ILMU POLITIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU EKONOMI	1	1	INSPEKTUR , SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT
26	PENATA KEUANGAN	S-1 AKUNTANSI	2	2	KOMISI ASN , KEPALA BAGIAN KEUANGAN , KEPALA SUBBAGIAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN
27	PENGADMINISTRASI KEUANGAN	D-3 MANAJEMEN PERKANTORAN / D-3 ADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1	KOMISI ASN , ASISTEN KASN BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
28	PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA	D-III AKUNTANSI / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER	1	1	KOMISI ASN , KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM , KEPALA SUBBAGIAN PERLENGKAPAN
29	PENGELOLA DATA LAYANAN INFORMASI DAN EDUKASI PUBLIK	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	1	KOMISI ASN , KEPALA BAGIAN DATA DAN INFORMASI , KEPALA SUBBAGIAN PENYAJIAN INFORMASI
30	PENGELOLA SISTEM DAN JARINGAN	D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER	3	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN , BIRO HUKUM, KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK , BAGIAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI , SUBBAGIAN OPERASIONAL TEKNOLOGI INFORMASI
		D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNIK KOMPUTER		2	KOMISI ASN , KEPALA BAGIAN DATA DAN INFORMASI , KEPALA SUBBAGIAN PENGEMBANGAN SISTEM DAN JARINGAN
31	AHLI PERTAMA - ASSESOR SDM APARATUR	S-2 PSIKOLOGI / S-2 PSIKOLOGI TERAPAN	1	1	SEKRETARIS KEMENTERIAN , BIRO SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM , BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA , SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR , ASSESSOR SDM APARATUR
32	PENGOLAH DATA ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN	D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III TEKNIK INFORMATIKA	1	1	KOMISI ASN , KEPALA BAGIAN KEUANGAN , KEPALA SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2		4		5
33	ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	S-1 ILMU PEMERINTAHAN / S-1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA / S-1 ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 ILMU ADMINISTRASI PUBLIK / S-1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 HUKUM / S-1 ILMU HUKUM	10	1	DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN , ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN I , BIDANG KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN I-1
				2	DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN , ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN I , BIDANG KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN I-2
				1	DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN , ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN II , BIDANG KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN II-1
				2	DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN , ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN II , BIDANG KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN II-2
				2	DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN , ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN III , BIDANG KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN III-1
				2	DEPUTI BIDANG REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN , ASISTEN DEPUTI KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN III , BIDANG KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN EVALUASI REFORMASI BIROKRASI, AKUNTABILITAS APARATUR, DAN PENGAWASAN III-2
34	PENYUSUN BAHAN BANTUAN HUKUM	S-1 ILMU HUKUM / S-1 HUKUM	2	2	KOMISI ASN , ASISTEN KASN BIDANG MEDIASI DAN PERLINDUNGAN SISTEM MERIT

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN
1	2		4		5
35	PENYUSUN BAHAN INFORMASI DAN PUBLIKASI	S-1 DESAIN KOMUNIKASI VISUAL / S-1 DESAIN GRAFIS / D-IV DESAIN GRAFIS	1	1	KOMISI ASN , KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT , KEPALA SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT
36	PENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN	S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU EKONOMI	1	1	KOMISI ASN , KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM , KEPALA SUBBAGIAN PERLENGKAPAN
37	PRANATA KEARSIPAN	D-III KEARSIPAN / D-III INFORMASI PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN / D-III SEKRETARI / D-III KESEKRETARIATAN	1	1	INSPEKTUR , SUBBAGIAN TATA USAHA INSPEKTORAT
38	SEKRETARIS	D-III SEKRETARI / D-III KESEKRETARIATAN / D-III MANAJEMEN PERKANTORAN / D-III ADMINISTRASI PERKANTORAN	5	1	KOMISI ASN , ASISTEN KASN BIDANG PENGAWASAN DAN MONITORING EVALUASI
				1	KOMISI ASN , ASISTEN KASN BIDANG PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM
				1	KOMISI ASN , ASISTEN KASN BIDANG MEDIASI DAN PERLINDUNGAN SISTEM MERIT
				1	KOMISI ASN , ASISTEN KASN BIDANG PENGADUAN DAN PENYELIDIKAN
				1	KOMISI ASN , ASISTEN KASN BIDANG PROMOSI DAN ADVOKASI
39	TEKNISI PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA	D-3 TEKNIK ELEKTRO / D-3 TEKNIK SIPIL / D-3 TEKNIK MESIN / D-3 TEKNIK LISTRIK	1	1	KOMISI ASN , KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM , KEPALA SUBBAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA
40	TEKNISI PERALATAN KANTOR	D-3 TEKNIK MESIN / D-3 TEKNIK ELEKTRO / D-3 TEKNIK LISTRIK	2	2	KOMISI ASN , KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN UMUM , KEPALA SUBBAGIAN PERLENGKAPAN